

## **IMPLEMENTASI MARHAENISME DALAM PENDIDIKAN INDONESIA**

### **(Studi Pada Sekolah Rakyat Tunas Merdeka Kota Surabaya)**

**Syamsudin Duka**

Program Studi S1-Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya  
syamsudinuka@yahoo.co.id

**Ali imron**

Program Studi S1-Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya  
aimron8883@gmail.com

#### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan latar belakang pendirian sekolah rakyat "Tunas Merdeka" kota Surabaya, implementasi marhaenisme dalam sekolah rakyat, serta respon orang tua siswa terhadap pendidikan Indonesia. Penelitian dilakukan di cabang GMNI kota Surabaya untuk menjelaskan fenomena gerakan pendidikan yang dilakukan dengan mendirikan sekolah rakyat. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan tiga kesadaran menurut Paulo Freire dan humanisme. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, pengamatan partisipatif, dan observasi langsung atau survey, sedangkan teknis analisis data menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa latar belakang berdirinya sekolah rakyat "Tunas Merdeka" kota Surabaya yaitu sebagai bentuk keresahan kondisi pendidikan saat ini terhadap komersialisasi pendidikan, sebagai wujud pengaktualisasian asas perjuangan marhaenisme, dan karena pendidikan yang belum mampu membentuk masyarakat moralis. Proses implementasi marhaenisme di sekolah rakyat "Tunas Merdeka" meliputi empat tahapan yaitu mengatur jadwal kegiatan sekolah rakyat, melakukan pengkajian mata pelajaran berdasarkan perspektif ideologi, memahami perilaku anak dengan melakukan suatu analisis sosial, dan terakhir adalah penanaman budi pekerti. Respon orang tua siswa sekolah rakyat terhadap pendidikan Indonesia saat ini didominasi oleh rasa kekecewaan terhadap sulitnya akses pendidikan bagi masyarakat kecil. Orang tua siswa sangat mengapresiasi adanya sekolah rakyat "Tunas Merdeka" sebagai wujud pendidikan gratis yang dapat meringankan beban mereka dan menaruh harapan besar terhadap organisasi-organisasi yang bervisi kerakyatan seperti GMNI.

**Kata kunci:** implementasi, marhaenisme, sekolah rakyat

#### **Abstract**

This study aims to describe the background of the founding from folk school "Tunas Merdeka" Surabaya, implementation of marhaenism in the folk school and the parents' response to the education of Indonesia. The research was conducted at GMNI branch of Surabaya city to explain the phenomenon of educational movement which was done by establishing folk school. The method used is qualitative method by using three consciousness approach according to Paulo Freire and humanism. Data collection techniques used were interviews, participatory observation, and direct observation or survey, while data analysis techniques used interactive analytical models of Miles and Huberman which included data reduction, data presentation, and conclusion or verification. The result of this research reveals that the background of the founding from the folk school "Tunas Merdeka" Surabaya is as a form of unrest in the current educational condition towards the commercialization of education, as a form of actualization of Marhaenism's struggle principle, and because education has not been able to form a moralist society. The process of implementing marhaenism in the "Tunas Merdeka" folk school includes four stages: arranging the schedule of the folk school, doing subjects based on ideological perspective, understanding the child's behavior by doing a social analysis, and the last is the cultivation of manners. The parents' response of folk school students to Indonesian education is currently dominated by a sense of disappointment about the difficulty of access to education for small communities. The parents really appreciate the existence of folk school "Tunas Merdeka" as a form of free education that can ease their burden and also put great hopes on organizations that have populist vision such as GMNI.

**Keywords:** *implementation, marhaenisme, folk school*

#### **PENDAHULUAN**

Pendidikan merupakan bagian penting dari kehidupan manusia yang tak pernah ditinggalkan. Sebagai sebuah proses, ada dua asumsi yang berbeda mengenai

pendidikan dalam kehidupan manusia. Pertama, pendidikan bisa dianggap sebagai sebuah proses yang terjadi secara tidak disengaja atau berjalan secara alamiah. Kedua, pendidikan dianggap sebagai proses

yang terjadi secara sengaja dan diorganisasi berdasarkan aturan yang berlaku, terutama perundang-undangan yang dibuat atas dasar kesepakatan masyarakat (nialovita.wordpress.com).

Tujuan dan pengorganisasian pendidikan mengikuti arah perkembangan sosial-ekonomi yang berjalan. Jadi, ada aspek material yang menjelaskan bagaimana arah pendidikan didesain berdasarkan siapa yang paling berkuasa dalam masyarakat tersebut. Seperti halnya analisis diskursus yang dikembangkan oleh Foucault bahwa kekuasaan selalu menentukan arah pengetahuan masyarakat. Bagi Foucault, pengetahuan bukanlah sesuatu yang ada tanpa berhubungan dengan kekuasaan yang sedang dijalankan dan pengetahuan menjadi tidak bebas nilai. Justru pengetahuan adalah peredaran negara dan perusahaan multinasional yang dalam kerangka ini tentu saja memajukan kapitalisme (Susetyo, 2005: 108).

Pendidikan merupakan sektor vital dalam pembangunan negara. Oleh karena itu, negara berkewajiban untuk meningkatkan kualitas pendidikan bagi masyarakat. Seperti diatur dalam UUD 1945 pasal 31, yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Pendidikan diasumsikan berfungsi meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang merupakan salah satu unsur penting pembangunan. Namun, kondisi saat ini terlihat aparaturnya berusaha melepaskan tanggung jawab dalam isu pendidikan.

Penelitian Edi Subkhan memperkuat hipotesis ini. Penelitian dengan judul "Narasi Kapitalisme Global Pendidikan Tinggi", menggambarkan etika kampus negeri tata kelolanya tidak berbeda dengan kampus swasta, terutama dalam aspek pendanaan. Negara kemudian memiliki alasan untuk tidak mendanai secara penuh biaya pendidikan bagi warga negaranya dan menyerahkan pendidikan tinggi kepada mekanisme pasar. Pada konteks ini, prinsip-prinsip kapitalisme dan liberalisme berjalan dalam praktik pendidikan tinggi (Subkhan, 2012: 14).

Kapitalisasi pendidikan merupakan bukti nyata keberpihakan pemerintah kepada masyarakat yang semakin jauh. Kapitalisasi pendidikan mengakibatkan lembaga-lembaga pendidikan berubah menjadi sebuah industri bukan lagi sebuah institusi yang menjadikan peserta didik hanya sebagai konsumen semata. Salah satu bentuk kapitalisasi pendidikan dalam koridor mekanisme pasar adalah menjamurnya Lembaga Bimbingan Belajar (LBB). Biaya LBB yang sangat mahal merupakan salah satu contoh pengakumulasi modal bagi kaum-kaum kapitalis sehingga hanya golongan tertentu saja yang dapat menikmatinya.

LBB ternama seperti *Primagama*, *Ganesha Operation*, dan *Sony Sugema College* (SSC). Hasil observasi menunjukkan bahwa biaya bimbingan yang

ditawarkan sungguh mencengangkan. Sebagai contoh misalnya, untuk setiap semester pada tahun ajaran 2016/2017, LBB *Primagama* untuk siswa SD (kelas 3, 4, 5), siswa SMP (kelas 7, 8, 9), siswa SMA (kelas 10, 11) ditentukan biayanya sebesar Rp.4.250.000-Rp.5.250.000 untuk satu kali program semester. Sedangkan bagi siswa SD kelas 6, siswa SMP kelas 9, atau siswa SMA kelas 12 biayanya Rp.7.500.000-Rp.12.250.000. Hal tersebut berbeda lagi dengan LBB *Ganesha Operation*, bagi siswa SD dan SMP kisaran biaya yang ditawarkan antara Rp. 4.350.000-Rp. 7.350.000, sedangkan untuk siswa SMA Rp. 5.700.000-Rp. 18.250.000. Untuk LBB *Sony Sugema College*, biaya bagi siswa SD Rp. 3.857.000-Rp.5.488.000, siswa SMP Rp. 2.314.000- Rp.13.853.000, dan siswa SMA Rp.4.074.000-Rp. 13.986.000. Biaya program reguler yang begitu fantastis belum seberapa jika dibandingkan dengan biaya program jaminan yang banyak ditawarkan LBB-LBB profesional tersebut hingga mencapai Rp. 25.000.000 untuk sekali program.

Meskipun Lembaga Bimbingan Belajar (LBB) merupakan lembaga pendidikan penunjang di luar lembaga formal sekolah, namun tetap saja mahal biaya menjadikan pendidikan tidak lagi dapat diakses secara adil dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya masyarakat menengah ke bawah. Sistem pengelolaan pendidikan oleh lembaga profesional telah mengarah ke industrialisasi dan kapitalisasi. Salah satu contoh, LBB yang dikelola oleh mahasiswa Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) UNESA angkatan tahun 2012. Mahasiswa tersebut memungut biaya LBB kepada siswanya disesuaikan dengan jenjang pendidikan siswanya. Misalnya, SMP sebesar Rp.30.000-Rp.50.000 per pertemuan; dan SMA Rp.50.000- Rp.75.000.

Masyarakat melihat mahasiswa seperti ini adalah mahasiswa yang mandiri, tidak membebankan orangtua. Namun, terlepas dari hal tersebut, perlu ditinjau kembali hakikat dari seorang mahasiswa yang berfilosofi Tri Dharma Perguruan Tinggi yang salah satunya adalah "Pengabdian Kepada Masyarakat". Walaupun demikian, mahasiswa tersebut tidak dapat disalahkan, sebab sistem pendidikan saat inilah yang membentunya seperti itu. Lembaga bimbingan belajar yang diharapkan menjadi penunjang kualitas pendidikan siswa, hari ini hanya dapat diakses oleh masyarakat dengan ekonomi menengah ke atas. Sedangkan golongan menengah ke bawah tidak bisa menikmati akses tersebut karena kesulitan dalam hal pembiayaan. Kondisi inilah yang mendorong organisasi Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) cabang Surabaya berinisiatif mendirikan sekolah rakyat agar masyarakat menengah

ke bawah bisa memperoleh akses pendidikan secara gratis.

Hal ini sesuai dengan ideologi marhaenisme sebagai ideologi Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) merupakan organisasi perjuangan yang lahir dari keadaan masyarakat Indonesia karena berideologi marhaenisme. Bung Karno menyatakan bahwa pergaulan hidup marhaenis adalah pergaulan hidup yang sebagian besar terdiri dari petani kecil, buruh kecil, pedagang kecil, pelajar kecil, kaum marhaen adalah semuanya kaum kecil (Kasenda, 2014: 38-39). Maka dalam setiap kader GMNI melekat jiwa, roh dan semangat sebagai pejuang. GMNI mengutamakan perjuangan yang terorganisir dan sebagai mahasiswa marhaenis yang progresif dan revolusioner.

GMNI yang mempunyai moto *pejuang pemikir – pemikir pejuang* dalam artian kader GMNI harus bisa menciptakan ide-ide revolusioner untuk pembebasan rakyat kecil, dibarengi dengan pengimplementasian yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Salah satu bentuk pembebasan rakyat kecil adalah dengan membentuk sekolah rakyat untuk golongan bawah sebagai solusi pada dunia pendidikan. Isu tentang liberalisasi pendidikan dan kapitalisasi pendidikan pernah dikaji oleh peneliti sebelumnya. Penelitian Moh. Taufik (2014) tentang “Resistensi Gerakan Mahasiswa Terhadap Kapitalisasi Pendidikan: Studi Organisasi Eksternal Kampus di Unesa”, menjelaskan berbagai bentuk resistensi gerakan mahasiswa terhadap kapitalisme pendidikan. Praktik kapitalisasi pendidikan yang menjadikan pendidikan berorientasi pada keuntungan atau profit semakin menggejolak, sehingga mengakibatkan peserta didik menjadi korban dari sistem tersebut.

Kondisi pendidikan secara nasional dapat dipahami dari isu liberalisasi pendidikan yang merupakan konsekuensi dari keikutsertaan negara dalam mekanisme pasar bebas melalui lembaga perdagangan dunia WTO (*World Trade Organization*) pada tahun 1994, yang menandatangani liberalisasi dunia pendidikan dalam kesepakatan GATS (*General Agreement on Trade in Services*), sehingga terbentuklah otonomi kampus agar bisa mandiri untuk mencari dana.

Komersialisasi pendidikan terlihat jelas ketika muncul kebijakan dari kampus untuk menaikkan biaya pendidikan, seperti kebijakan BPKP (Biaya Peningkatan Kualitas Pendidikan) pada tahun 2011 dan muncul kebijakan UKT (Uang Kuliah Tunggal) pada tahun 2013 (Taufik, 2014: 6-7).

Senada dengan Moh. Taufik, kajian yang dilakukan Samrin (2015) tentang “Kapitalisme dan Pendidikan Liberal-Kapitalistik”, yang menjelaskan bahwa kapitalisme adalah paham yang menyatakan bahwa tidak

ada pembatasan dari negara bagi warga negaranya guna memiliki properti pribadi sehingga dimungkinkan terjadinya akumulasi modal pada perorangan. Watak dasar kapitalisme adalah persaingan bebas dan keuntungan material. Kapitalisme bersumber dari liberalisme.

Liberalisme adalah paham yang menyatakan bahwa negara tidak boleh ikut campur tangan dalam berbagai sendi kehidupan warga negaranya, sehingga negara hanya dibatasi kepada menjaga ketertiban umum dan penegakan hukum. Kapitalisme mempengaruhi dunia pendidikan karena prinsip kapitalisme digunakan sebagai paradigma pendidikan.

Penerapan sistem kapitalis dalam dunia pendidikan menimbulkan dampak buruk bagi negara. Salah satu dampak yang paling mendasar adalah biaya pendidikan semakin mahal yang menyebabkan tidak semua masyarakat bisa mengakses pendidikan, sehingga akan semakin sedikit kesempatan bagi warga yang kurang mampu dalam memperoleh pendidikan. Akibatnya, pemerataan pendidikan tidak akan bisa berjalan, karena masih banyak warga yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menempuh jenjang pendidikan (Samrin, 2015: 144).

Sedangkan untuk penelitian Eroby Jawi Fahmi (2008) tentang “Pendidikan Berbasis Masyarakat: Studi Tentang Rumah Pengetahuan Amartya, Bantul”, menjelaskan bahwa pendidikan berbasis masyarakat di Rumah Pengetahuan Amartya (RPA) lahir dengan ide besar untuk menghilangkan diskriminasi dalam pendidikan, menyamaratakan kesempatan memperoleh pendidikan bagi kalangan miskin dan mendekatkan proses pendidikan dalam realitas kehidupan. Tujuan pendidikan berbasis masyarakat di RPA adalah untuk menyediakan akses memperoleh pendidikan bagi masyarakat miskin secara gratis, menumbuhkan kembangkan pemahaman dan kesadaran akan realitas sosial, politik dan ekonomi dengan melibatkan mereka pada proses pendidikan, diharapkan kelak masyarakat mengambil alih, mengelola dan menciptakan komunitasnya sendiri (Fahmi, 2008: 80).

Sejauh mana kesamaan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti yang lain bahwa, kapitalisasi dan liberalisasi pendidikan adalah sistem yang menindas bagi rakyat kecil dan instrumentasi perjuangan GMNI adalah ideologi yang lahir dan berjuang bagi rakyat kecil, yaitu Marhaenisme. Sehingga pada kenyataannya pemerintah telah menyalahi undang-undang dasar 1945 pasal 31 yang menyatakan bahwa seluruh warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan. Sekolah rakyat merupakan bentuk perjuangan GMNI untuk mengembalikan hakikat pendidikan seutuhnya yaitu memanusiakan manusia.



Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan latar belakang pendirian sekolah rakyat, mendeskripsikan implementasi marhaenisme dalam sekolah rakyat Tunas Merdeka Surabaya, dan mendeskripsikan respon orangtua siswa terhadap pendidikan Indonesia.

## KAJIAN PUSTAKA

### Marhaen, Marhaenis, dan Marhaenisme

Marhaen adalah kaum yang dimelaratkan oleh sistem. Jadi, dia hanya mempunyai alat-alat produksi yang serba minim, seperti cangkul, sawah sepetak, dan seterusnya. Ini jauh berbeda dengan terminologi proletar. Proletar hanya menjual jasa, dan tidak punya alat produksi. Proletar adalah basis untuk gerakan komunisme. Komunisme menggunakan teori *klassenstrijd* (pertentangan kelas). Sedangkan marhaenisme adalah asas pergerakan dan perjuangan guna mengangkat kaum marhaen. Marhaenis adalah kaum yang memperjuangkan rakyat kecil atau si marhaen guna mengangkat derajatnya. Marhaenisme menentang *klassen bewust* (kesadaran kelas si miskin dan si kaya bersama berjuang menuju sosialisme atau masyarakat adil makmur berkeadilan) ([www.kepastakaan-presiden.perpusnas.go.id](http://www.kepastakaan-presiden.perpusnas.go.id)).

### Konsep Marhaenisme

#### *Radikal-revolusioner*

Radikal-revolusioner adalah cara perjuangan untuk melakukan perubahan secara mendasar dan cepat. Radikal revolusioner tidak ada hubungannya dengan kekerasan, amuk-amukan, apalagi bunuh-bunuhan, tetapi cara perjuangan yang tidak hanya tambal sulam. Hal mendasar dari radikal-revolusioner adalah non-kooperatif.

#### *Nonkooperatif*

Nonkooperatif adalah perjuangan dengan tidak melalui jalan kompromi, bukan perjuangan memintaminta, dan non-kooperasi ditujukan terhadap sistem yang melakukan pemerasan dan penindasan, terhadap sistem yang menistakan kemerdekaan individu dan keadilan sosial. Terhadap sistem yang mendatangkan kesengsaraan dan penderitaan itulah non-kooperasi diarahkan.

#### *Machtsvorming dan Machtsaanwending*

Machtsvorming adalah perhimpunan kekuatan yang dilandasi satu kesatuan semangat dan cita-cita, satu penyusunan kekuatan berdasarkan mental ideologi, dan merupakan sumber dalam menggunakan kekuatan (*machtsaanwending*) dan bukan hanya himpunan orang dalam jumlah yang banyak, bukan juga himpunan yang sifatnya lahiriah.

### *Massa Aksi*

Massa aksi adalah suatu massa aksi yang didasari pada kesadaran bersama atas tujuan perjuangan, massa aksi bukanlah gerakan yang harus dengan jumlah besar, tetapi setiap tindakan yang dapat melahirkan kesadaran rakyat untuk menimbulkan gerakan yang radikal-revolusioner.

#### *Self Help dan Self Reliance*

Self help adalah suatu gerakan yang tidak bergantung kepada kekuatan sesuatu pihak melainkan harus berdasarkan kekuatan sendiri. Dengan menggantungkan diri pada pihak lain maka dapat membuka peluang terhadap pihak lawan untuk mengkooptasi (membelokan gerakan dengan niat buruk) gerakan. Dengan dasar self help, suatu gerakan akan memiliki self reliance (kepercayaan diri).

### Ideologi Pendidikan Menurut William F. Oneil

#### *Ideologi pendidikan konservatif*

Ideologi pendidikan konservatif terdiri dari tiga tradisi pokok yaitu fundamentalisme pendidikan, intelektualisme pendidikan, dan konservatisme pendidikan. Ketiga jenis ideologi pendidikan tersebut memiliki perbedaan atau rentang mulai dari yang mendasarkan diri mereka pada penerimaan yang relatif tanpa kritik terhadap kebenaran yang diwahyukan atau konsensus sosial yang sudah mapan.

#### *Ideologi pendidikan liberal*

Ideologi pendidikan liberal seperti konservatif terdiri dari tiga tradisi yaitu liberalisme pendidikan, liberationisme pendidikan dan anarkisme pendidikan ideologi-ideologi tersebut dari ungkapan yang kurang liberal, yakni liberalisme pendidikan hingga posisi yang paling radikal adalah anarkisme pendidikan.

### Pendidikan Humanisme (Paulo Freire)

Humanisasi adalah fitrah manusia. Oleh karena itu, humanisasi adalah hak yang perlu diperjuangkan. Fitrah ini yang seringkali diingkari, namun demikian dia justru diakui dari pengingkaran tersebut. Pemikiran Freire tentang humanisasi yang dilatarbelakangi oleh situasi ketertimpangan di tempat asalnya memicu semangatnya untuk membangkitkan upaya panyadaran terhadap masyarakat agar dapat melihat sumber penyebab terjadinya ketimpangan itu.

Freire mengelompokkan masyarakat sebagai bagian dari penerima pendidikan atau dapat disebut sebagai peserta didik dalam konteks kemasyarakatan kedalam 3 bagian :

1. Peserta didik berkesadaran magis (semi transitif) adalah konsep pendidikan ketika masyarakat menganggap bahwa nasib yang menimpa dirinya adalah takdir yang sudah diatur tuhan Sang Pencipta.

Karakter peserta didik dengan tipologi seperti ini ditandai dengan sikap menerima dan melarikan diri dari kenyataan yang brutal dan penindasan yang kejam.

2. Sementara pendidikan naif dialami oleh mereka yang telah melihat dan memahami penyebab carut marut dalam kehidupannya, namun mereka belum memiliki kesadaran untuk bangkit dan menggugat dan berusaha memperjuangkan hak-hak mereka.
3. Lain halnya dengan pendidikan kritis yang ingin diserukan Freire, pendidikan kritis mendidik manusia untuk peka terhadap realita dan masalah di sekitarnya. Manusia berkesadaran magis pada umumnya hanya dapat “menyesuaikan” diri dengan lingkungan sedang manusia berkesadaran “naif” hanya berusaha memperbaharui, tapi berbeda dengan keduanya, manusia berkesadaran kritis akan senantiasa berfikir bagaimana “mengubah” keadaan yang terjadi menuju keadaan yang lebih baik.

Bagi Freire, manusia bebas adalah manusia sejati, yaitu manusia merdeka yang mampu menjadi subjek bukan hanya menjadi objek yang hanya menerima sebuah perlakuan dari pihak lain.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan tiga kesadaran menurut Paulo Freire dan humanisme. Tiga kesadarannya yaitu kesadaran magis, kesadaran naif, dan kesadaran kritis. Humanisme merupakan paham pemerdayaan masyarakat melalui ilmu pengetahuan artinya proses memanusiakan manusia atau membebaskan masyarakat (Freire, 2007: 191).

Metode ini akan melibatkan peneliti dalam meneliti yang lebih mendalam dan pemeriksaan yang menyeluruh terhadap perilaku individu atau kelompok. Di samping itu, pendekatan penelitian tersebut dapat mengantarkan peneliti memasuki unit-unit sosial terkecil seperti perhimpunan, kelompok, keluarga, dan berbagai unit sosial lainnya karena peneliti menjadi salah satu partisipan dalam penelitian ini.

Penelitian ini dilakukan di GMNI cabang Surabaya, Jln. Pucang Adi No. 62 Kota Surabaya, untuk menjelaskan fenomena gerakan pendidikan yang dilakukan oleh cabang GMNI Kota Surabaya dengan mendirikan sekolah rakyat. Informan dalam penelitian ini adalah penggagas sekolah rakyat, tenaga pembimbing atau kader GMNI cabang Surabaya, dan orangtua siswa sekolah rakyat. Teknik yang digunakan dalam pemilihan informan yaitu dengan teknik *purposive*. Teknik *purposive* adalah pemilihan informan dalam penelitian ditetapkan berdasarkan seleksi yaitu orang-orang yang

mengetahui masalah-salah dalam penelitian (Wirjoko dan Ansori, 2009: 10).

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode wawancara, angket, dan observasi partisipatif, dimana peneliti tidak hanya menjadi pengamat pasif, melainkan juga mengambil peran dalam situasi dan berpartisipasi dalam peristiwa-peristiwa yang akan diteliti.

Teknis analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyaian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Latar Belakang Berdirinya Sekolah Rakyat “Tunas Merdeka” Surabaya

#### 1. Keresahan pendidikan saat ini terhadap komersialisasi pendidikan

Berdasarkan temuan data dari hasil observasi dan wawancara dengan dua tokoh penggagas berdirinya sekolah rakyat “Tunas Merdeka” dapat diketahui bahwa sekolah rakyat “Tunas Merdeka” yang berada dibawah naungan PUSMIRA Surabaya berdiri sebagai bentuk keprihatinan terhadap fenomena pendidikan saat ini yang cenderung mengkomersialkan pendidikan sehingga menjadi sulit untuk diakses oleh masyarakat yang berasal dari golongan ekonomi rendah.

Pemikiran yang menggagas berdirinya sekolah rakyat “Tunas Medeka” sejalan dengan pemikiran Paulo Freire tentang pendidikan humanisme. Freire menganggap bahwa pendidikan diperlukan untuk memecahkan kontradiksi penindas-tertindas, sehingga kaum-kaum tertindas yang dalam hal ini adalah masyarakat dari golongan ekonomi bawah harus dapat mengentaskan dirinya dari kondisi ketertindasan melalui pendidikan (Freire, 2008: 48). Kaitannya dengan hal tersebut, Freire mengelompokkan tiga jenis kesadaran masyarakat akan pendidikan ke dalam kesadaran magis, kesadaran naif, dan kesadaran kritis. Ketiga kesadaran tersebut menentukan seberapa jauh individu atau masyarakat dalam mewujudkan pembebasan dirinya melalui pendidikan.

#### 2. Asas perjuangan marhaenisme

Berdasarkan data wawancara yang didapatkan sebelumnya, penggagas sekolah rakyat menjelaskan bahwa dalam marhaenisme terdapat enam asas yang salah satunya adalah *self-reline* atau asas menolong sesama. Dalam asas tersebut diajarkan bahwa inti dari menolong sesama tersebut adalah meringankan beban kaum marhaen. Hal itulah yang kemudian menjadi salah satu faktor yang melatarbelakangi berdirinya sekolah rakyat.

Semangat tersebut sejalan dengan pemikiran Paulo Freire dimana dalam humanisme pendidikan, manusia sejati dikatakan dapat bebas atau merdeka ketika mereka mampu menjadi subjek bukan sebagai objek yang hanya menerima sebuah perlakuan dari pihak lain. Dalam kasus sekolah rakyat ini, masyarakat dari golongan tertindas atau dari ekonomi yang lemah diharapkan untuk bisa bangkit dari kondisi mereka. Untuk dapat menuju cita-cita tersebut, pertama-tama mereka haruslah menyadari kondisi dan posisi mereka, selanjutnya adalah berusaha memanfaatkan segala pikiran dan tenaga untuk menjadi kekuatan penggerak bagi dirinya sendiri. Hal seperti itulah yang dimaksud dengan humanisasi.

### 3. Pendidikan yang belum mampu membentuk masyarakat moralis

Pendidikan yang belum mampu membentuk masyarakat yang moralis, artinya pendidikan saat ini dianggap hanya dapat menciptakan pekerja. Pemikiran-pemikiran kritis para penggagas sekolah rakyat “Tunas Merdeka” terhadap sekolah rakyat dan pendidikan saat ini tergolong merupakan pemikiran liberalisme pendidikan, sebab mempunyai semangat untuk memperbaiki tatanan sosial dengan cara mendidik dan membuka kesadaran para siswa bagaimana untuk menghadapi persoalan-persoalan sosial saat ini. Seperti teori William F. O’Neil tentang ideologi pendidikan liberal yang menyatakan bahwa pendidikan seharusnya merupakan alat untuk memperbaiki tatanan sosial masyarakat (O’neil, 2002: 106).

### B. Implementasi Marhaenisme dalam Sekolah Rakyat “Tunas Merdeka”

Proses implementasi marhaenisme dilakukan dengan pembiasaan perilaku peserta didik dan metode-metode pengajaran yang dilakukan oleh para pengajar. Proses implementasi marhaenisme dalam sekolah rakyat “Tunas Merdeka” diawali dengan internalisasi marhaenisme terlebih dahulu dalam diri kader atau pengajar sekolah rakyat.

Dari penuturan pengajar-pengajar sekolah rakyat “Tunas Merdeka” yang telah dimintai informasi, diketahui bahwa proses internalisasi marhaenisme dalam diri mereka meliputi penanaman integritas dan harmonisasi ideologi secara akademis. Nilai integritas meliputi kejujuran, *social sense*, serta gotong royong. Kejujuran dilakukan dengan menjadi pribadi yang apa adanya serta jujur dalam setiap perbuatan mulai dari dalam pikiran. Memiliki *social sense* berarti peka terhadap kondisi dan realita sosial yang terjadi di masyarakat. Sedangkan gotong royong memiliki makna saling bekerja sama untuk mencapai tujuan.

Proses internalisasi marhaenisme selanjutnya yaitu harmonisasi ideologi dengan akademis. Harmonisasi dapat diartikan sebagai penyesuaian atau penyelarasan, yang meliputi dua hal yaitu mengasah pola pikir berdasarkan pelajaran, dengan cara mendalami bidang keilmuan masing-masing dan menjadikan ideologi sebagai landasan dalam mengkaji realita berdasarkan keilmuan.

Setelah proses internalisasi, maka selanjutnya barulah dilakukan proses eksternalisasi atau implementasi marhaenisme kepada masyarakat khususnya para peserta didik sekolah rakyat. Proses implementasi tersebut dilakukan melalui empat cara. Pertama yaitu mengatur jadwal kegiatan yang ada di sekolah rakyat “Tunas Merdeka”. Pengaturan jadwal tersebut dilakukan untuk menyesuaikan waktu yang paling tepat bagi anak-anak untuk belajar diluar sekolah. Contoh pengaplikasian implementasi marhaenisme dengan memperhatikan waktu pengaturan jadwal adalah adanya kegiatan diluar seperti kunjungan ke museum, outbond, dan keikutsertaan lomba pada hari-hari besar bersejarah.

Proses implementasi marhaenisme yang kedua yaitu dengan melakukan pengkajian mata pelajaran berdasarkan perspektif ideologi. Pengkajian tersebut bertujuan agar semangat yang terkandung dalam marhaenisme dapat diimplementasikan di dalam mata pelajaran yang peserta didik pelajari di sekolah rakyat.

Terakhir, proses implementasi dilakukan dengan penanaman budi pekerti yang baik sesuai dengan semangat marhaenisme. Penanaman budi pekerti yang baik tentu saja dilakukan dengan membiasakan kebiasaan-kebiasaan yang terpuji kepada peserta didik dimanapun berada. Kebiasaan-kebiasaan yang selalu dilakukan oleh para peserta didik bersama dengan pengajar di sekolah rakyat “Tunas Merdeka” misalnya adalah berdoa sebelum dan setelah kegiatan belajar, menyanyikan lagu Indonesia Raya setelah pembelajaran, sholat berjamaah, dan kebiasaan lainnya. Aktivitas-aktivitas tersebut walaupun terlihat sederhana namun apabila dilakukan terus menerus maka akan menjadi suatu sikap yang positif dan dapat memperlerat nasionalisme.

Jika dilihat dari konteks kesadaran menurut Freire, peserta didik sekolah rakyat yang mayoritas berasal dari kelompok masyarakat golongan menengah ke bawah dapat dikategorikan masih memiliki kesadaran magis dan naif. Peserta didik dengan kesadaran magis mayoritas adalah anak tingkat sekolah dasar awal dimana mereka menganggap bahwa nasib yang menimpa dirinya adalah takdir yang sudah diatur Tuhan Sang Pencipta. Hal tersebut sangatlah wajar sebab anak-anak usia tersebut masih belum cukup memahami penyebab dari kondisi yang mereka alami.



Karakter peserta didik dengan tipologi seperti ini ditandai dengan sikap menerima dan melarikan diri dari kenyataan yang brutal dan penindasan yang kejam. Sedangkan kesadaran naïf rata-rata sudah dimiliki oleh peserta didik dengan jenjang pendidikan yang lebih tinggi mulai dari kelas 5 atau 6 SD hingga peserta didik tingkat SMP. Mereka sudah mampu melihat dan memahami penyebab segala sesuatu dalam kehidupannya namun belum memiliki kesadaran untuk bangkit dan menggugat serta memperjuangkan hak-hak mereka.

Maka, disinilah peran dari adanya sekolah rakyat yang memiliki fungsi untuk mengubah pola pikir para pemuda bangsa agar dapat melihat dan menyikapi realita sosial secara kritis. Kesadaran magis dan naïf tersebut secara perlahan dapat berubah menjadi suatu kesadaran yang kritis melalui suatu pendidikan. Dalam hal inilah marhaenisme diimplementasikan secara perlahan melalui bimbingan belajar di sekolah rakyat.

### **C. Respon Orangtua Siswa Sekolah Rakyat “Tunas Merdeka” terhadap Pendidikan Indonesia saat ini**

#### **1. Perspektif orangtua siswa dengan adanya sekolah rakyat “Tunas Merdeka”**

Berdasarkan data hasil wawancara dengan orang tua siswa sekolah rakyat “Tunas Merdeka”, semua sepakat bahwa adanya sekolah rakyat adalah suatu hal yang positif karena dapat meringankan beban mereka.

Walaupun tanpa adanya pungutan biaya atau gratis, namun para orang tua siswa mengaku bahwa ada perubahan yang terlihat pada anak mereka ketika bergabung di sekolah rakyat daripada sebelumnya. Peningkatan yang terlihat dalam bidang akademik walaupun tidak terlalu signifikan, namun peningkatan dalam bersikap yang baik jauh lebih terlihat.

#### **2. Harapan orangtua siswa kepada sekolah rakyat “Tunas Merdeka”**

Apa yang diharapkan oleh para orang tua siswa meliputi peningkatan fasilitas di sekolah rakyat dalam rangka untuk mengimbangi perkembangan teknologi di dunia pendidikan. Selain itu, mereka juga menaruh harapan yang besar pada organisasi-organisasi yang peduli terhadap nasib rakyat kecil seperti GMNI.

Apa yang diharapkan orang tua siswa tersebut menggambarkan bahwa masyarakat kecil menaruh harapan yang besar terhadap pihak-pihak yang peduli terhadap kepentingan mereka, pihak yang pro terhadap rakyat. Disinilah fungsi organisasi kerakyatan seperti GMNI sesungguhnya, yaitu sebagai sebuah organisasi dengan ideologi yang lahir dan berjuang bagi rakyat kecil. Dalam usaha melaksanakan fungsi tersebut, maka sekolah rakyat merupakan bentuk perjuangan GMNI

untuk mengembalikan hakekat pendidikan seutuhnya yaitu memanusiakan manusia.

## **PENUTUP**

### **Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian implementasi marhaenisme dalam sekolah rakyat “Tunas Merdeka” Kota Surabaya dapat disimpulkan beberapa hal yaitu (1) Latar belakang berdirinya sekolah rakyat “Tunas Merdeka” kota Surabaya yaitu sebagai bentuk keresahan kondisi pendidikan saat ini terhadap komersialisasi pendidikan, sebagai wujud pengaktualisasian asas perjuangan marhaenisme, dan karena pendidikan yang belum mampu membentuk masyarakat moralis; (2) Implementasi marhaenisme dalam sekolah rakyat “Tunas Merdeka” kota Surabaya dilakukan melalui suatu tahapan yang diawali dengan proses internalisasi terlebih dahulu. Proses internalisasi meliputi penanaman integritas dan harmonisasi ideologi secara akademis. Sedangkan proses implementasi meliputi empat tahapan yaitu mengatur jadwal kegiatan sekolah rakyat, melakukan pengkajian mata pelajaran berdasarkan perspektif ideologi, memahami perilaku anak dengan melakukan suatu analisis social, dan terakhir adalah penanaman budi pekerti; (3) Respon orang tua siswa sekolah rakyat “Tunas Merdeka” terhadap pendidikan Indonesia saat ini didominasi oleh rasa kekecewaan terhadap sulitnya akses pendidikan bagi masyarakat kecil. Orang tua siswa sangat mengapresiasi adanya sekolah rakyat “Tunas Merdeka” sebagai wujud pendidikan gratis yang dapat meringankan beban mereka. Orang tua siswa juga menaruh harapan yang besar terhadap organisasi-organisasi yang bervi kerakyatan seperti GMNI agar selalu memihak dan peka terhadap realitas sosial terutama pada rakyat kecil

### **Saran**

Perlu adanya peningkatan kualitas pengajar di sekolah rakyat “Tunas Merdeka” kota Surabaya melalui berbagai pelatihan pedagogi sehingga akan dihasilkan pengajar-pengajar yang berkualitas. Sekolah rakyat “Tunas Merdeka” perlu membangun kemitraan bersama *stage holder* atau para pemandu kepentingan seperti dinas pendidikan, dewan pendidikan, dan LSM yang bergerak di bidang pendidikan guna untuk meningkatkan kualitas dan kemajuan sekolah rakyat dalam masyarakat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Fahmi, Jawi Eroby. 2008. “Pendidikan Berbasis Masyarakat: Studi Tentang Rumah Pengetahuan Amartya, Bantul”. *Skripsi* Tidak Dipublikasikan. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

- Freire, Paulo. 2007. *Politik Pendidikan Kebudayaan, Kekuasaan dan Pembebasan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- , 2008. *Pendidikan Kaum Tertindas*. Jakarta: Pustaka LP3ES.
- Kasenda, Peter. 2014. *Sukarno, Marxisme dan Leninisme*. Jakarta: Kali Malang-Pondok Gede.
- Lovita, Nia. 2012. *Pendidikan Karakter*. (Online). (<https://nialovita.wordpress.com/2012/%2001/16/makalah-pendidikan-karakter>). Diakses 15 Januari 2016).
- O'neil, F, William. 2002. *Idologi-ideologi Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Samrin. 2015. "Kapitalisme dan Pendidikan Liberal-Kapitalistik". *Shautut Tarbiyah*, No. 33 Th. XXI. November 2015. (Online).(<http://ejournal.iainkendari.ac.id/>).
- Soekarnoputri, Rachmawati. 2001. "Soekarnoism is to Kill Soekarno". (Online). (<http://kepuustakaan-presiden.perpusnas.go.id/>). Diakses 11 April 2016).
- Subkhan, Edi. 2012. "Narasi Kapitalisme Global PendidikanTinggi". *Jurnal Sosiologi Pendidikan*. Vol. 1, No. 1, Agustus 2012.
- Susetyo, Benny. 2005. *Politik Pendidikan Penguasa*. Yogyakarta: LKiS.
- Taufik. 2014. "Resistensi Gerakan Mahasiswa Terhadap Kapitalisasi Pendidikan". *Jurnal Paradigma*. Vol. 2.No. 3. (Online).(<http://ejournal.unesa.ac.id/>). Diakses.21 Januari 2016.
- Wirjoko, Iskandar dan Soemardji Ansori. 2009. *Metode penelitian kualitatif, Bidang Ilmu-ilmu Sosial Humaniora*. Surabaya: Unesa University Press.